

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan yang sejahtera merupakan kehidupan yang diinginkan oleh semua manusia. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan hidup secara sejahtera (Ningrum et al., 2020). Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan, salah satunya pada bidang ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi indikatornya. Menurut Adam Smith dalam Prihastuti (2018) sumber daya manusia merupakan input yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ini merupakan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan juga kualitas manusia itu sendiri (Ningrum et al., 2020).

Pembangunan ekonomi daerah adalah salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional karena pembangunan daerah memiliki sinergi dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah (Wijaya, 2019). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, membuat pembangunan daerah yang ada di Indonesia atau pembangunan nasional memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerahnya sendiri.

Salah satu indikator terpenting yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, itulah sebabnya dalam perencanaan pembangunan ini pembangunan manusia selalu menjadi focus utama di setiap daerah. Indonesia sendiri

mengakui jika hak untuk hidup layak adalah hak asasi manusia yang telah diakui secara universal, yang telah tertuang dalam UUD 1945 bahwa tugas pokok pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian manusia adalah pusat dari pembangunan dimana manusia adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam, pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Menurut Adam Smith dalam Prihastuti (2018) sumber daya manusia merupakan input yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ini merupakan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan juga kualitas manusia itu sendiri (Prihastuti, 2018).

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran atas seluruh daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik

sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia

Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu perhatian karena pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan pembangunan seringkali dilihat dari capaian kualitas Sumber Daya Manusia. Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur kualitas manusia dan skala ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kualitas manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan

lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). (BPS Jawa Timur, 2020)

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (2020), terdapat perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode tahun 2016-2020 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya meskipun secara nominal tetap tumbuh secara positif. Fenomena tersebut dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada semua sector di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak dari virus ini mencakup dalam berbagai hal mulai dari segi sosial maupun ekonomi.

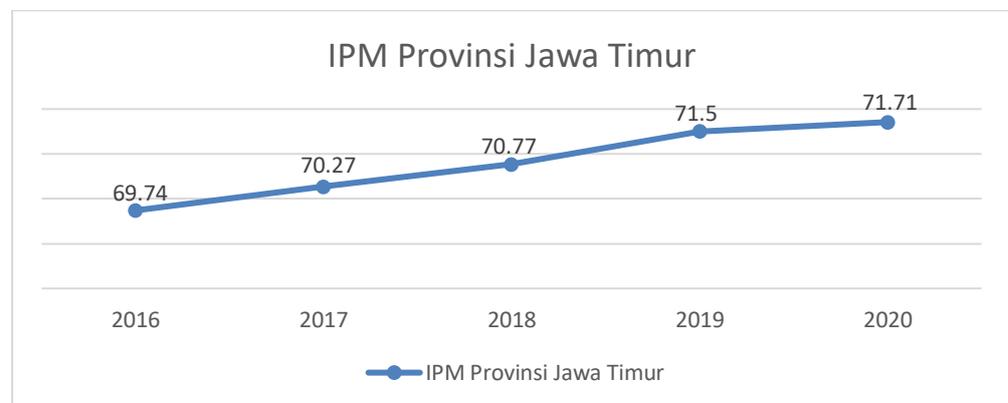
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia



Sumber: BPS, 2022

Grafik diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia periode tahun 2016-2020. Dalam periode ini, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia meningkat dari 70,18 pada tahun 2016 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun yang berada pada level tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh sebesar 0,03 persen dari tahun 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2016–2020 menjadi sebesar 0,62 persen per tahun. Seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami perlambatan termasuk Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur

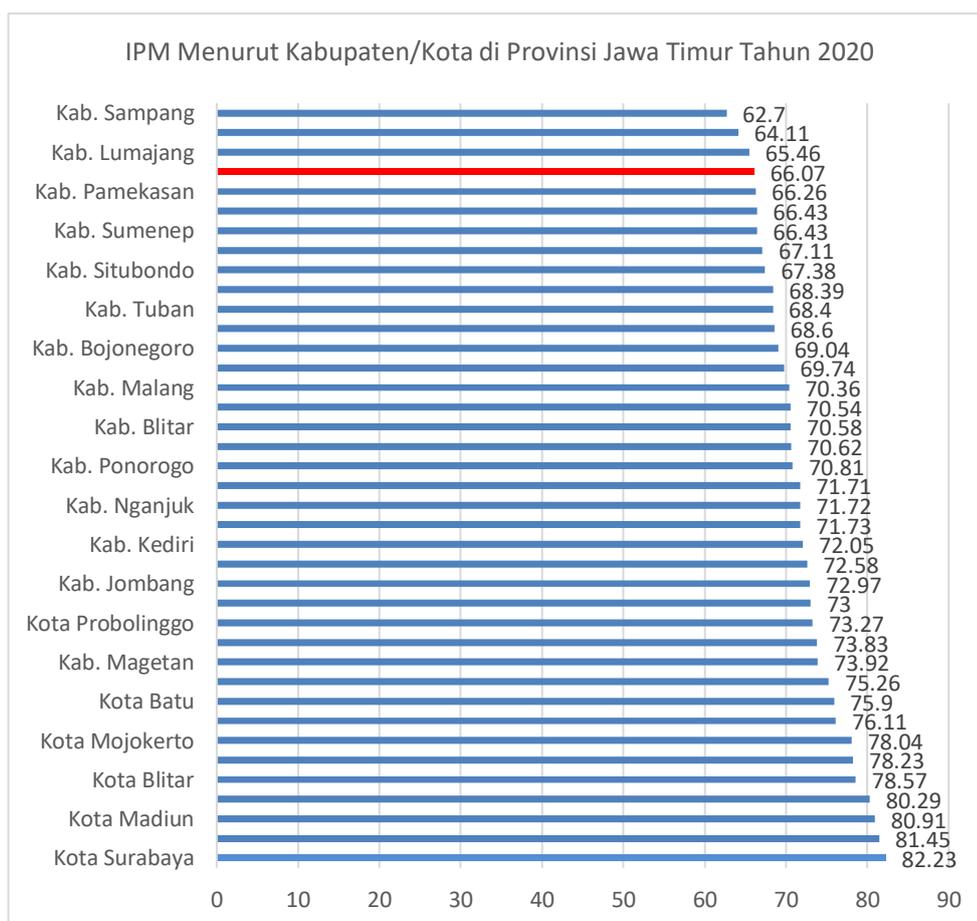


Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Grafik diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Dalam periode ini, pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan meskipun masih dibawah IPM Indonesia. IPM Jawa Timur meningkat dari 69,74 pada tahun 2016 menjadi 71,50 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-

rata tumbuh sebesar 0,83 persen per tahun yang berada pada level tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 tercatat sebesar 71,71 atau tumbuh sebesar 0,03 persen dari tahun 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2016–2020 menjadi sebesar 0,69 persen per tahun. IPM Jawa Timur berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71,94 walau termasuk kategori provinsi yang mempunyai IPM dengan nilai tinggi. Kedua hal tersebut disebabkan adanya dampak negatif terhadap pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Akibatnya, indeks pengeluaran juga mengalami penurunan.

Gambar 1.3 IPM menurut Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2020



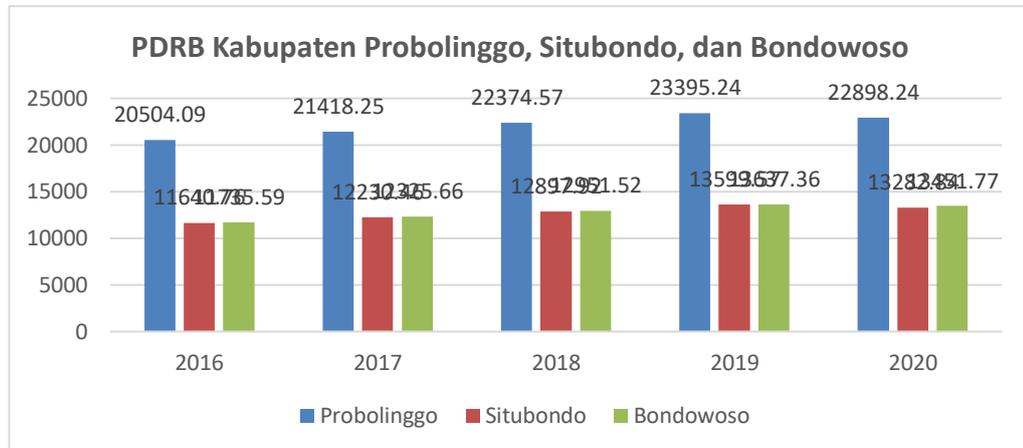
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat jika terdapat 4 kabupaten/kota yang berkategori sangat tinggi dengan nilai diatas 80 yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 20 kabupaten/kota dengan pembangunan manusia berkategori tinggi dengan nilai 70-80 yaitu: Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kab. Gresik, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Magetan, Kab. Mojokerto, Kota Probolinggo, Kab. Tulungagung, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Ponorogo, Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Ngawi, dan Kab. Malang. Serta sisanya sebanyak 14 kabupaten berkategori sedang dengan IPM 60-70, yaitu: Kab. Trenggalek, Kab. Bojonegoro, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Pacitan, Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Sumenep, Kab. Bondowoso, Kab. Pamekasan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang.

BPS menyebutkan sebagian besar IPM rendah di Jawa Timur berada di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. Karena di wilayah ini masih dijumpai rumah tangga yang tidak memiliki toilet sendiri atau memanfaatkan aliran sungai untuk mandi, cuci, kakus (MCK), budaya pernikahan dini, dan pendidikan yang rendah.

Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah tapal kuda yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sedang. Berada di urutan ke-36 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Timur membuat pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Probolinggo tertinggal dari Provinsi Jawa Timur.

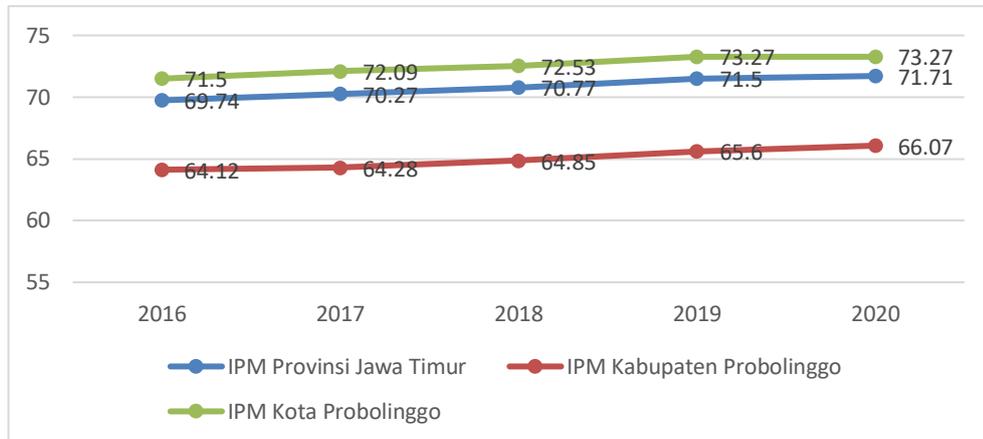
Gambar 1.4. Grafik PDRB Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso.



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat jika nilai PDRB Kabupaten Probolinggo lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten Situbondo. Dimana kedua kabupaten tersebut berada di kabupaten pesisir pantai yang memiliki karakteristik daerah dan karakteristik masyarakat yang hampir sama. Dapat dilihat jika PDRB Kabupaten Probolinggo lebih besar dalam kontribusinya dalam PDRB Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo. Namun PDRB yang lebih besar tersebut tidak membuat Kabupaten Probolinggo memiliki IPM yang tinggi pula. Dengan penjelasan tersebut, dipilih Kabupaten Probolinggo sebagai daerah penelitian karena dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama yaitu Kabupaten Situbondo dan Bondowoso memiliki nilai IPM yang lebih rendah daripada daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama meskipun nilai PDRBnya lebih tinggi.

Gambar 1.5 Grafik Perbandingan IPM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo



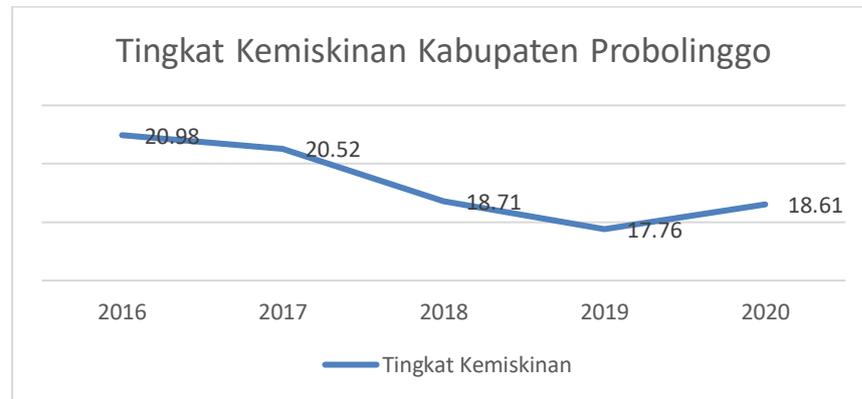
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur. Dan jauh tertinggal dengan kota tetangga yaitu Kota Probolinggo yang memiliki kesamaan adat istiadat dan perilaku perilaku masyarakat yang hampir sama. Untuk itu pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) supaya dapat naik level menjadi daerah dengan pembangunan manusia berkategori tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia melalui Pendidikan adalah hal yang paling dasar. Dengan Pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat melalui pembelajaran yang dapat membuat pemikiran lebih berkembang sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang luar biasa.

Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Todaro Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan daripada untuk kebutuhan pendidikan dan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas diri. Sebaliknya, penduduk kaya pengeluaran rumah tangganya akan berimbang. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya.

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia.

Gambar 1.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Probolinggo

Sumber: BPS Kab. Probolinggo, 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 mencapai sekitar 18 persen. Di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masuk urutan ke 35, atau urutan ke 4 daerah terbanyak angka kasus kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo 2019 turun sebesar 0,95 poin persen dibandingkan 2018, yaitu dari 18,71 persen pada 2018 menjadi 17,76 persen pada Maret 2019. Artinya, diantara 100 orang di kabupaten Probolinggo terdapat 17 orang yang masuk kategori miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih berada pada urutan tertinggi ke-empat di Jawa Timur.

Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Masalah kemiskinan merupakan hal penting yang perlu ditangani pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Akibatnya kemiskinan akan menghambat individu untuk mendapatkan pendidikan yang

layak dan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah yang mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia juga rendah.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM adalah pengangguran. Pembangunan sektor ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi.

Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Probolinggo

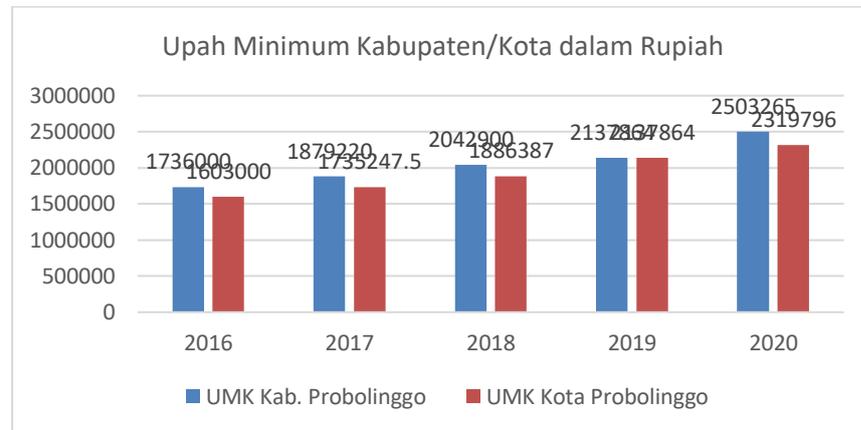


Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 dan BPS Kota Probolinggo, 2022

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Tetapi memang nilai IPM Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Probolinggo. Seharusnya jika pengangguran tinggi menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan itu adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di Kabupaten Probolinggo menunjukkan hal yang berbeda, tingkat pengangguran terbuka yang kecil belum tentu nilai IPMnya lebih besar.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) supaya dapat naik level menjadi daerah dengan pembangunan manusia berkategori tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan atau upah yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin besar juga pengeluarannya.

Gambar 1.8 Upah Minimum Kabupaten dan Kota Probolinggo



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 dan BPS Kota Probolinggo, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat jika upah minimum di Kabupaten Probolinggo sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Kota Probolinggo. Dimana hal ini tidak sebanding dengan nilai IPM yang dimiliki kedua daerah tersebut. Dimana kota Probolinggo memiliki nilai IPM jauh lebih besar disbanding dengan Kabupaten Probolinggo sendiri. Dimana seharusnya jika seseorang memiliki pendapatan atau upah yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutulan lain tersebut maka diharapkan kesejahteraan pembangunan manusia dapat tercapai. Tetapi hal sebaliknya justru terjadi, di Kabupaten Probolinggo meskipun memiliki uoah minimum yang bisa dikatakan cukup besar tetapi memiliki nilai IPM yang sedang saja.

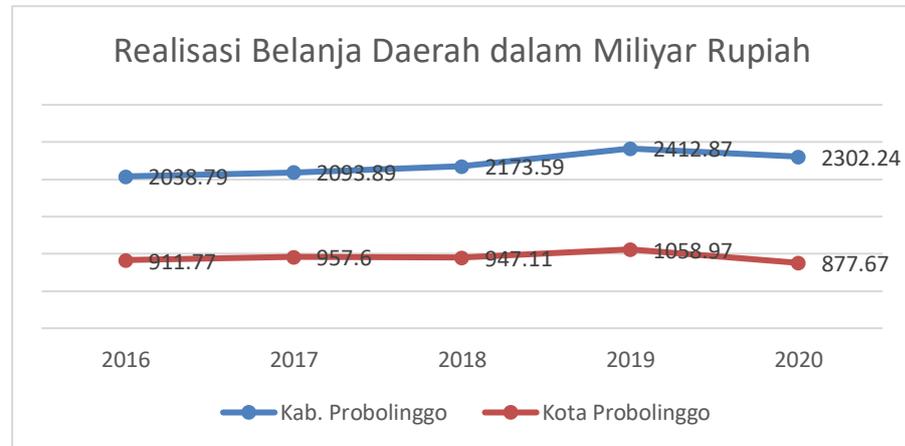
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah

dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi (Ningrum et al., 2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Syofya, 2018). Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi maka pembangunan manusia di daerah tersebut juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah selain aspek pemerataan dan stabilitas. Peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu factor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, modal, social budaya, dan perkembangan teknologi.

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dengan kewenangannya yang besar harus mampu mendayagunakan alokasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiscal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.9 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Probolinggo dalam Miliar Rupiah



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 dan BPS Kota Probolinggo, 2022

Dari grafik diatas, diketahui jika realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo jauh lebih besar daripada realisasi belanja pemerintah daerah Kota Probolinggo tetapi seperti yang kita tahu di **Gambar 1.5 Grafik Perbandingan IPM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo** menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo jauh diatas Kabupaten Probolinggo. Fenomena yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan, bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi pula. Naiknya realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM.

Dalam penelitian milik Indrasuara Luther Sirangi Si'lang, Zamruddin Hasid, Priyagus di tahun 2019 dengan judul “Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat” dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu analisis Regresi Linier Berganda. Menunjukkan hasil jika PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara secara parsial, PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, dan Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat (Zamruddin Hasid, 2019).

Dalam penelitian Heppi Syofya tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia” yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil secara simultan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Secara parsial, baik tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Syofya, 2018).

Dalam penelitian Diah Komariah, Mukhammad Yogiandoro, Alexandra Hukom Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan

Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia” yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kotawaringin (Komariah et al., 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik untuk dibahas mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi belanja pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. Sehingga diangkat judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo?
5. Bagaimana pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo
5. Untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat dari seberapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto* saja tetapi melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat menyejahterakan. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan manusia adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian.

Semua data yang meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pemerintah daerah tersedia secara *time series* pada website resmi milik BPS dan *website* resmi milik Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini menggunakan data Kabupaten Probolinggo secara *time series* dari tahun 2010-2021.

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan serta menerapkan kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo secara maksimal sehingga kesejahteraan manusia semakin meningkat dan merata.

1.5 Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian diatas, yang ingin didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada pada suatu daerah dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai saran penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian serta sebagai perbandingan penelitian dimasa yang akan datang.